
ARTICLE

IMPLEMENTASI STRATEGI UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BUKIT PUNGGUR DALAM PENGELOLAAN WISATA AIR TERJUN PUTRI MALU DI KABUPATEN WAY KANAN

Alya Nazla Hafidh Zalma^{1*}, Dian Kagungan², Ita Prihantika³

¹²³Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Zalma, H.N.A., Kagungan, D., Prihantika, I. (2026). Implementasi Strategi UPTD KPH Bukit Punggur dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Putri Malu di Kabupaten Way Kanan.

Article History

Received: 13 Desember 2025

Accepted: 13 Januari 2026

Keywords:

Programs
Budgets
Procedures
Human Resources
Cotourism

Kata Kunci:

Program
Anggaran
Prosedur
Sumber Daya Manusia
Ekowisata

ABSTRACT

Ecotourism is a concept of tourism activities where there are elements of natural resource conservation, community empowerment, and increasing environmental awareness. This study aims to analyze the implementation of the Bukit Punggur Forest Management Unit (KPH) UPTD strategy in the management of Putri Malu Waterfall tourism in Way Kanan Regency and identify its inhibiting factors. The research is motivated by the decrease in the number of tourist visits and the limitation of human resources in tourism promotion and development. The method used is descriptive qualitative research with interview, observation, and documentation techniques. The analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn, with validity tests using source triangulation. This research refers to the strategy implementation theory from Thomas L. Wheelen and J. David Hunger (2020) which includes implementing actors, programs, budgets, procedures, and human resource management. The results of the study show that the implementation of the strategy is not fully optimal. The obstacles identified include limited human resources, budget limitations, accessibility to tourist sites that are still inadequate, and lack of innovation in the development of tour packages. The advice that can be given is that tourism managers need to be carried out in a sustainable manner through training, coaching, and mentoring activities that focus on the management of tourist destinations, digital promotion, tourism services, and the development of tourism products, tourism development efforts are suggested in the provision of basic facilities that are still limited, such as sanitation facilities, directions, garbage dumps, and environmental signs. Working with third parties such as Corporate Social Responsibility (CSR) and related institutions to meet tourism needs, the development of tourism innovations needs to be improved through diversification of tourism products and activities that utilize the potential of natural resources, environmental services, and the potential of local communities.

* Corresponding Author

Email : AlyaNazlaHafidhZalma@gmail.com

ABSTRAK

Ekowisata merupakan konsep dari kegiatan pariwisata dimana didalamnya terdapat unsur konservasi sumberdaya alam, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran akan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur dalam pengelolaan wisata Air Terjun Putri Malu di Kabupaten Way Kanan serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian dilatarbelakangi oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam promosi dan pengembangan wisata. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi strategi dari Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger (2020) yang meliputi aktor pelaksana, program, anggaran, prosedur, dan pengelolaan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, aksesibilitas menuju lokasi wisata yang masih kurang memadai, serta minimnya inovasi pengembangan paket wisata. Saran yang dapat diberikan ialah pengelola wisata perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang berfokus pada pengelolaan destinasi wisata, promosi digital, pelayanan wisata, serta pengembangan produk wisata, upaya pengembangan wisata disarankan pada penyediaan sarana dasar yang masih terbatas, seperti fasilitas sanitasi, penunjuk arah, tempat pembuangan sampah, serta rambu keselamatan. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan lembaga terkait guna memenuhi kebutuhan wisata, pengembangan inovasi wisata perlu ditingkatkan melalui diversifikasi produk dan aktivitas wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, jasa lingkungan, dan potensi masyarakat setempat.

A. PENDAHULUAN

Ekowisata merupakan konsep dari kegiatan pariwisata dimana didalamnya terdapat unsur konservasi sumberdaya alam, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran akan lingkungan hidup (Nugroho, 2011). Ekowisata mengalami sebuah perubahan sejalan dengan berkembangnya zaman, namun pada hakekatnya ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab pada kelestarian alam yang masih terjaga kealamiannya dengan memberikan manfaat secara ekonomi.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah salah satu organisasi tingkat tapak yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola sumber daya alam secara terpadu serta berkelanjutan, yang mencakup aspek pengelolaan hutan dan pengelolaan wisata alam secara terintegrasi (Hernowo & Ekawati, 2014). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk wisata.

Selain itu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga berperan sebagai fasilitator dalam membangun kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat guna keberhasilan pengelolaan wisata alam. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang terdapat pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Bukit Punggur termuat tentang

pemanfaatan hutan tertentu yang meliputi pemanfaatan wisata alam. Pemanfaatan wisata alam menjadi salah satu fokus pengembangan. Terdapat beberapa lokasi potensial yang dapat dikembangkan di area UPTD KPHP Bukit Punggur salah satunya adalah wisata Air Terjun Putri Malu yang berada di Kesatuan Hutan Lindung (KHL) Register 24 Bukit Punggur.

Pengembangan wisata alam pada wilayah kawasan hutan memerlukan pendekatan bertahap dan terstruktur untuk mencegah dampak negative dari kunjungan wisatawan.. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi untuk memberikan peringatan agar kegiatan wisata alam pada Kawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Adapun strategi yang dilakukan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur adalah dengan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pengelolaan wisata air terjun putri malu, memberikan bantuan fasilitas berupa sarana dan prasarana seperti bantuan kotak sampah, pembangunan gazebo untuk beristirahat, serta melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah desa dan berbagai pihak lainnya dalam mengembangkan objek wisata tersebut.

Tabel 1. Data Kunjungan Wisata Air Terjun Putri Malu

No	Tahun	Wisatawan Mancanegara	Nusantara	Jumlah
1.	2022	2	4.045	4.047
2.	2023	4	6.300	6.304
3.	2024	-	5.700	5.700
	Total			16.051

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan pada tabel diatas, meskipun memiliki potensi besar, data kunjungan wisatawan ke Air Terjun Putri Malu diatas menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2024, jumlah pengunjung menurun menjadi 5.700 orang, tanpa adanya wisatawan mancanegara, dibandingkan dengan 6.304 orang pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya permasalahan yang memerlukan strategi komprehensif dari UPTD KPH Bukit Punggur sebagai pemilik kawasan dan Pokdarwis sebagai pengelola. Salah satu faktor yang diidentifikasi adalah lemahnya pengetahuan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aspek promosi wisata dan pengembangan paket wisata. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai strategi yang telah dan akan di implementasikan oleh UPTD KPH Bukit Punggur untuk meningkatkan pengelolaan wisata air terjun Putri Malu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen strategi

Menurut Marrus (2001) dikutip dalam Robinson dkk (2019) strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan organisasi jangka panjang. Menurut Porter (1991) dalam Wijiharjono (2021) strategi mencakup pemilihan pasar yang tepat, pengembangan proposisi nilai yang unik, dan pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih baik daripada pesaing. Menurut David et al (2020) strategi memiliki beberapa jenis yakni: 1) Strategi Korporat, 2)Strategi Bisnis, 3) Strategi Fungsional, 4) Strategi Operasional, 5) Strategi Inovasi, 6) Strategi Pemasaran, 7) Strategi Global, 8) Strategi Responsif, 9) Strategi Keberlanjutan. Wheelen dan Hunger dalam Sudianti (2022) disebutkan bahwa terdapat empat elemen dasar yang terdapat dalam manajemen strategi yaitu sebagai berikut:

Berikut merupakan penjelasan mengenai empat elemen dasar manajemen strategi diatas:

1. Pemindaian Lingkungan (*Environmental Scanning*)
2. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)
3. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)
4. Evaluasi Dan Kontrol (*Evaluation And Control*)

Implementasi strategi

Menurut Soekanto dalam Nilasari (2014), implementasi strategi didefinisikan sebagai pengelolaan berbagai peralatan organisasi dan manajemen yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya perusahaan (seperti keuangan, sumber daya manusia, peralatan, dan lain-lain) melalui strategi yang telah dipilih. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi strategi yang dikemukakan oleh Wheelen dan Hunger.

Menurut Wheelen dan Hunger (2020) implementasi strategi adalah proses di mana manajemen menerapkan strategi dan kebijakan ke dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Dalam karya mereka, Wheelen dan Hunger menyatakan bahwa untuk memulai proses implementasi strategi, ada tiga pertanyaan penting yang harus dijawab:

1. Aktor pelaksana strategi: ini berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam implementasi strategi.
2. Pelaksana strategi: untuk mendukung implementasi strategi yang telah dirancang, kolaborasi dalam mengembangkan program, anggaran, dan prosedur.
3. Pengelolaan sumber daya manusia: ini melibatkan pengorganisasian untuk bertindak. Proses manajemen strategi secara keseluruhan mencakup berbagai aktivitas penting yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasikan strategi, termasuk pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pelaksanaan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada dalam implementasi strategi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur dalam meningkatkan pengelolaan wisata air terjun Putri Malu di Kabupaten Way Kanan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan apa saja Implementasi Strategi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur dalam meningkatkan pengelolaan wisata air terjun Putri Malu di Kabupaten Way Kanan.

Lokasi penelitian ini terletak di dua tempat yakni UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur dan Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dimana terdapat wisata air terjun Putri Malu. pemilihan lokasi ini berdasarkan pada penemuan penulis terhadap beberapa kejadian atau permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata khususnya pada wisata air terjun Putri Malu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan berdasarkan temuan di lapangan saat penelitian berlangsung. Uraian penelitian diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan implementasi strategi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur dalam pengelolaan wisata air terjun putri malu di Kabupaten Way Kanan.

Aktor Pelaksana Strategi

Tabel 2. Peran Aktor Pelaksana Strategi

No	Aktor pelaksana strategi	Peran utama	Bentuk keterlibatan	Hubungan antar aktor
1.	UPTD KPH Bukit Punggur	Fasilitator dan pemegang kewenangan kawasan	Membina, mengarahkan, serta mengawasi pengelolaan wisata	Berkoordinasi dengan KPS/Gapoktan, Pokdarwis, dan Pemerintah Kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan
2.	Gapoktan	Pelaksana utama pengelolaan wisata	Mengelola operasional wisata, merancang strategi pengembangan	Berinteraksi langsung dengan KPH sebagai pembina dan Pokdarwis dalam pengembangan wisata
3.	Pokdarwis	Pendukung pengembangan pariwisata	Membantu promosi dan pengembangan daya tarik wisata	Berkolaborasi dengan Gapoktan dan KPH dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat
4.	Pemerintah Kampung Juku Batu	Pendukung kebijakan lokal dan pemberdayaan masyarakat	Memfasilitasi masyarakat dan mendukung kegiatan wisata	Berkoordinasi dengan KPH dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan berbasis lokal

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antar aktor dalam implementasi strategi pengelolaan wisata Air Terjun Putri Malu menunjukkan pola kolaboratif. UPTD KPH Bukit Punggur berperan sebagai fasilitator utama yang memiliki kewenangan kawasan, sedangkan KPS/Gapoktan bertindak sebagai pelaksana langsung di lapangan. Pokdarwis berfungsi sebagai aktor pendukung dalam aspek pengembangan pariwisata, khususnya promosi dan peningkatan daya tarik wisata. Sementara itu, pemerintah kampung berperan dalam memperkuat legitimasi sosial serta mendorong partisipasi masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan arah pengelolaan yang tertuang dalam RPHJP KPH Bukit Punggur Tahun 2025–2034 yang menekankan pentingnya pengembangan pengelolaan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat serta sinergi antar pihak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi strategi pada aspek aktor pelaksana telah sesuai dengan arah kebijakan RPHJP yang mengedepankan kolaborasi multipihak, meskipun efektivitas peran masing-masing aktor masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan wisata dapat berjalan lebih optimal.

Pelaksana Strategi (Program, Anggaran, Prosedur)

Table 3. Program, Anggaran, Prosedur

No	Aspek	Uraian kegiatan	Pelaksana	Tahun	Keterangan
1.	Program	Penguatan kelembagaan (Gapoktan, Pokdarwis, Pemerintah kampung) melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	UPTD KPH Bukit Punggur	2023	Fokus ada pengelolaan wisata air terjun Putri Malu.
		Promosi wisata air terjun Putri Malu	UPTD KPH Bukit Punggur	2021	Fokus pada promosi wisata air terjun Putri Malu
		Pelatihan masyarakat (Gapoktan) di Kampung Juku Batu	Pemerintah Kampung	2023	Mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata
		Kegiatan pengembangan wisata (belum optimal dari Pokdarwis)	Pokdarwis	2021-2025	Terhambat kondisi alam & keterbatasan SDM
2.	Anggaran	Pendanaan program KPH	APBD Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan	2023–2024	Digunakan untuk operasional dan program pembinaan
		Dukungan dana desa untuk kegiatan wisata (non-infrastruktur)	Pemerintah Kampung	2022–2024	Terbatas karena regulasi penggunaan dana desa
		Pendapatan lokal (tiket masuk & parkir)	Pokdarwis	2020–2024	Digunakan untuk kebutuhan operasional sederhana
3.	Prosuder	Koordinasi kegiatan melalui surat resmi dan pertemuan	KPH & Pemerintah Kampung	2022–2024	Prosedur administratif dasar sudah berjalan
		Pengelolaan wisata berbasis kesepakatan lokal (karcis, ojek, homestay)	Pemerintah Kampung & Masyarakat	2023–2024	Bersifat sederhana dan belum terstandarisasi
		SOP pengelolaan wisata	Pokdarwis	-	Belum tersedia secara formal

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapat dilapangan terkait dengan pelaksana strategi program pada pengelolaa wisata air terjun putri malu di kabupaten way kanan dapat disimpulkan bahwa strategi program yang dilakukan oleh KPH belum cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan wisata Air Terjun Putri Malu yang terdapat di Kampung Juku Batu. diketahui bahwa anggaran yang terdapat pada UPTD Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) bukit punggur berasal dari APBD Provinsi Lampung dimana anggaran tersebut tersalurkan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, selain dari APD Provinsi Lampung KPH mendapatkan anggaran melalui swadaya Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

Selain kesatuan pengelolaan hutan (KPH) aktor terkait seperti pemerintah kampung juku batu menganggarkan sebagian dana desa untuk pengelolaan wisata air terjun putri malu, penganggaran dana tersebut berupa perlengkapan pakaian pokdarwis berupa rompi dan topi dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wisata air terjun putri malu yang terletak dikabupaten way kanan terdapat permasalahan yang cukup jelas terlihat dari segi anggaran yang dimana anggaran tersebut tidak mencukupi dalam meningkatkan pengelolaan wisata air terjun putri malu. kurangnya anggaran yang tersedia menjadikan sulitnya KPH maupun aktor terkait dalam meningkatkan pengelolaan wisata. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti SOP yang dilakukan oleh KPH sudah sesuai dengan Pergub Nomor 59 tahun 2021 mengenai tugas dan fungsi KPH seperti pembuatan surat tugas dan sebagainya.

Seperti yang telah diketahui bahwa prosedur dilakukan guna memastikan bahwa program dan anggaran dapat berjalan dengan beriringan serta dengan adanya prosedur dapat menggambarkan secara jelas mengenai bagaimana suatu tugas dapat diselesaikan. Namun pada beberapa aktor terkait masih terdapat aktor yang belum memahami apa itu prosedur secara teknis sehingga belum terdapatnya komunikasi yang baik mengenai pengelolaan wisata air terjun Putri Malu di Kabupaten Way Kanan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Proses manajemen strategi secara keseluruhan mencakup beberapa jenis aktivitas krusial yang berlandaskan pada tindakan guna mengimplementasi strategi; Pengorganisasian, pengusunan staff, serta pengarahan Wheleen dan Hunger (2020). UPTD KPH Bukit Punggur mengimplementasikan strategi dengan poin-poin berikut yakni:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata Air Terjun Putri Malu dilaksanakan melalui pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor yang terlibat, yaitu pihak UPTD KPH Bukit Punggur, masyarakat sekitar, serta pihak pendukung lainnya. Dalam implementasinya, UPTD KPH Bukit Punggur berperan sebagai koordinator utama dalam pengelolaan kawasan wisata. Peran tersebut meliputi pembinaan masyarakat, pengawasan kawasan hutan, fasilitasi kegiatan wisata, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Pokdarwis dan masyarakat berperan dalam pengelolaan operasional wisata seperti menjaga kebersihan kawasan, membantu pelayanan pengunjung, serta menjaga fasilitas wisata.

Pengorganisasian tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan dalam RPHJP KPHP Unit III Tahun 2025–2034 yang menekankan pentingnya pengelolaan hutan berbasis kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengorganisasian pengelolaan wisata masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya koordinasi antar aktor, belum adanya pembagian tugas yang sepenuhnya jelas, serta belum terbentuknya sistem pengelolaan wisata yang lebih terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan pengelolaan wisata masih bersifat insidental dan belum berjalan secara konsisten.

2. Penataan Staff (*Staffing*)

Penataan staf dalam pengelolaan wisata Air Terjun Putri Malu dilakukan melalui penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pengelolaan wisata dan pengelolaan kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya, UPTD KPH Bukit Punggur melibatkan pegawai internal serta masyarakat sekitar kawasan sebagai bentuk pengelolaan berbasis partisipatif.

Berdasarkan dokumen RPHJP KPHP Unit III Tahun 2025–2034, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pengelolaan

hutan dan pengembangan jasa lingkungan. Oleh karena itu, UPTD KPH Bukit Punggur telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat, Pokdarwis, dan kelompok tani sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelola wisata. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan sumber daya manusia masih menghadapi berbagai kendala. Jumlah personel yang terlibat dalam pengelolaan wisata masih terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan, pelayanan wisata, dan promosi belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, sebagian pengelola wisata masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam bidang pengelolaan wisata, pelayanan pengunjung, serta promosi digital.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan sumber daya manusia masih menghadapi berbagai kendala. Jumlah personel yang terlibat dalam pengelolaan wisata masih terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan, pelayanan wisata, dan promosi belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, sebagian pengelola wisata masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam bidang pengelolaan wisata, pelayanan pengunjung, serta promosi digital. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi dan rasa memiliki terhadap objek wisata. Akan tetapi, tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kondisi tersebut berpotensi menghambat terciptanya pengelolaan wisata yang profesional.

3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan dalam pengelolaan wisata Air Terjun Putri Malu dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, koordinasi, dan pemberian arahan kepada kelompok pengelola wisata dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pengarahan dilakukan melalui forum diskusi, sosialisasi pemanfaatan kawasan hutan, pelatihan pengelolaan wisata, serta pembinaan masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata.

Meskipun kegiatan pengarahan telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat dan pengunjung yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata. Selain itu, kegiatan pembinaan dan pendampingan belum dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia dalam implementasi strategi pengelolaan wisata Air Terjun Putri Malu menunjukkan bahwa aspek pengorganisasian, penataan staf, dan pengarahan telah dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dalam RPHJP KPHP Unit III Tahun 2025–2034. Namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan pengelolaan wisata belum berjalan secara optimal.

Faktor Penghambat

Mengimplementasikan suatu strategi maupun kebijakan tidak mungkin bahwa tidak adanya faktor penghambat dalam implementasi strategi maupun kebijakan yang telah di rencanakan. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi perlu dilakukan mengingat suatu implementasi tidak akan selalu berjalan dengan baik terdapat pula hambatan yang terjadi pada implementasi strategi maupun kebijakan yang telah dirancang sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi strategi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Putri Malu masih menghadapi

berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan wisata. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kondisi aksesibilitas menuju lokasi wisata yang belum memadai, serta minimnya inovasi dalam pengembangan produk dan paket wisata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai program telah dilaksanakan, pelaksanaan strategi belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi strategi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Putri Malu di Kabupaten Way Kanan, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan pengembangan wisata yang berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan program pengembangan wisata, keterbatasan sumber daya pendukung, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata yang dimiliki kawasan Air Terjun Putri Malu.

1. Implementasi strategi pada aspek aktor pelaksana telah berjalan melalui keterlibatan berbagai pihak yang terdiri dari UPTD KPH Bukit Punggur, Pemerintah Kampung Juku Batu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Gapoktan, dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Keterlibatan para aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wisata telah dilaksanakan secara kolaboratif melalui pembagian peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian, sinergi dan koordinasi antaraktor masih perlu diperkuat agar pelaksanaan strategi dapat berjalan lebih efektif.
2. Implementasi strategi pada aspek pelaksanaan strategi yang meliputi program, anggaran, dan prosedur telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti promosi wisata, pembinaan masyarakat, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, serta pengembangan fasilitas pendukung wisata. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya UPTD KPH Bukit Punggur dalam mengembangkan Wisata Air Terjun Putri Malu sebagai salah satu potensi jasa lingkungan yang dimiliki kawasan hutan. Akan tetapi, pelaksanaan program belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran yang memengaruhi realisasi kegiatan pengembangan wisata. Selain itu, prosedur pelaksanaan kegiatan telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.
3. Implementasi strategi pada aspek pengelolaan sumber daya manusia telah dilakukan melalui pengorganisasian, penataan staf, dan pengarahan kepada kelompok pengelola wisata. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD KPH Bukit Punggur menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata. Namun demikian, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pengembangan wisata, khususnya dalam aspek promosi, pelayanan wisata, serta pengembangan produk wisata yang inovatif.

Adapun faktor penghambat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor penghambat implementasi strategi yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, aksesibilitas menuju lokasi wisata yang masih kurang memadai, serta minimnya inovasi dalam pengembangan paket wisata. Keempat faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan strategi belum mampu menghasilkan pengembangan wisata yang optimal. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi strategi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya organisasi dan kondisi lingkungan pendukung.

Saran

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola wisata perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang berfokus pada pengelolaan destinasi wisata, promosi digital, pelayanan wisata, serta pengembangan produk wisata. Upaya tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan strategi pengelolaan wisata yang lebih efektif dan profesional.
2. Upaya pengembangan wisata disarankan difokuskan pada penyediaan sarana dasar yang masih terbatas, seperti fasilitas sanitasi, penunjuk arah, tempat pembuangan sampah, serta rambu keselamatan.
3. Ketersediaan data kunjungan juga perlu didukung melalui pencatatan pengunjung yang tertib agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan pendukung pengajuan anggaran, atau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan lembaga terkait guna memenuhi kebutuhan wisata.
4. Pengembangan inovasi wisata perlu ditingkatkan melalui diversifikasi produk dan aktivitas wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, jasa lingkungan, dan potensi masyarakat setempat. Upaya tersebut dapat mendukung peningkatan daya tarik wisata sekaligus memperkuat keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2020). *Strategic management: Concepts and cases, a competitive advantage approach* (Seventeenth edition). United Kingdom: Pearson.
- Hernowo, B., & Ekawati, S. (Ed.). (2014). *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah awal menuju kemandirian* Bogor: Penerbit PT Kanisius.
- Hunger & Thomas L. Wheelen, J. David. (2020). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- KPH Bukit Punggur. (2014). *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Bukit Punggur Kabupaten Way Kanan 2015-2024*. Blambangan Umpu: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Nilasari, S. (2014). *Manajemen strategi*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Nugroho I. (2011). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Robinson, T. K., Kiyai, B., & Mambo, R. (2019). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bolaaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84).
- Sudiantini, D. (2022). *Manajemen Strategi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada
- Wijiharjono, N. (2021). *Manajemen Strategik: Pemikiran Michael Porter dan Implikasinya bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif*. (Skripsi). Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.